

PENGARUH REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN RETRIBUSI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DENGAN DIMODERASI OLEH BELANJA MODAL

Oleh

Annafi Indra Tama
Univeristas Islam '45 Bekasi

Abstract

This research aims to find out about the effect of the realization of local tax and levies revenues to the unemployment and moderated by capital expenditure in 33 provinces in Indonesia. Audited Financial statement of 33 Province for period 2013 to 2015 are used in this research. Using moderated regression analysis, the results showed only levies are a significant negative effect to the unemployment while local taxes and capital expenditure has no effect to unemployment. Capital spending could not moderate the effect of local taxes and levies to unemployment.

Keywords: *Realization of Local Tax Revenue, Levies Income, Capital Spending, the Unemployment Rate level*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting, karena melalui sektor ini dapat diketahui sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Darwanto dan Yustikasari (2006) Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah agar mampu membiaya kebutuhan sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Novita (2012) menyatakan bahwa peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Namun hal tersebut tidaklah selalu bersifat linear.

Belanja daerah yang di dalamnya terdapat proyek modal yang dapat menciptakan *outcome* akan sangat mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi, namun sebaliknya, bila proyek modal tersebut merupakan proyek mubazir atau hanya memberikan *income* marjinal hasilnya tidak akan cukup untuk mengakselerasi kesejahteraan ekonomi yang ada di daerah.

Penelitian ini dimotivasi oleh adanya perkiraan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal akan memperbaiki perekonomian masing-masing daerah, namun disisi lain upaya untuk meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dalam hal ini peningkatan pajak dan retribusi daerah tidak serta merta mengurangi pengangguran, serta masih adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) diantara penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat pengaruh PAD (pajak dan retribusi daerah) dan belanja modal terhadap beberapa variabel terikat antara lain tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengetahui apakah kebijakan desentralisasi dan pengalihan pajak ke daerah dapat mengurangi jumlah pengangguran. Peneliti memfokuskan pada pengaruh pajak dan retribusi daerah pada tingkat pengangguran serta melihat dampak variabel moderasi belanja modal pada pajak dan retribusi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikembangkan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh realisasi pendapatan pajak daerah terhadap tingkat pengangguran?
2. Bagaimana pengaruh realisasi pendapatan retribusi terhadap tingkat pengangguran?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran?
4. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap tingkat pengangguran dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi?

5. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat pengangguran dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh realisasi pendapatan pajak daerah terhadap tingkat pengangguran.
2. Mengetahui pengaruh realisasi pendapatan retribusi terhadap tingkat pengangguran.
3. Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap tingkat pengangguran.
4. Mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap tingkat pengangguran sebagai belanja modal sebagai pemoderasi.
5. Mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap tingkat pengangguran dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen and Meckling (1976) dalam Rossietta dan Wibowo (2009) memandang hubungan antara manajer dan pemilik dalam kerangka hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terjadi kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak tersebut mengharuskan agen memberikan jasa kepada pemilik. Pendelegasian wewenang dari pemilik kepada manajemen membuatnya memiliki hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Akan tetapi, kepentingan dua pihak ini tidak selalu sejalan sehingga muncul benturan-benturan kepentingan antara keduanya.

Menurut Lane dalam Halim dan Abdullah (2006) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Lane menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hubungan keagenan dalam organisasi sektor publik terbagi ke dalam beberapa hal yaitu: hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah, hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif kemudian antara legislatif dengan publik dan hubungan keagenan dalam pemanfaatan anggaran daerah.

Hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah terjadi pada saat penyusunan APBD. Dalam sudut pandang teori keagenan, hal ini merupakan sebuah bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.1.2 Teori *fiscal federalism*

Desentralisasi anggaran berbasis teori *fiscal federalism*, diharapkan bisa menjadi formula terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multipliernya. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya (*Closer government to People*). Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakatnya akan memungkinkan untuk lebih banyak menggali dan mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakatnya (*local need and preferences*). Teori *fiscal federalism*, menjelaskan bahwa pemerintah akan bersifat sangat bijaksana dan berusaha untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi publik yang efisien dan efektif berdasarkan pada *collective preferences* dari masyarakatnya (*their constituent*).

Konsep *fiscal federalism* juga menjelaskan bahwa desentralisasi anggaran, akan memungkinkan pemerintah daerah lebih mengetahui informasi kebutuhan dan sumberdaya daerah. Pengetahuan ini akan memungkinkan pemerintah daerah memberdayakan dan mengalokasikan sumber daya (*local accountability*) dalam bentuk anggaran untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga akan bersifat sangat bijaksana dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi publik (Oates, 1993).

Keputusan ekonomi publik meliputi peran pemerintah daerah dalam alokasi dan distribusi atas sumber-sumber ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Blanchard, 2000). Penerapan desentralisasi anggaran juga memudahkan pemerintah daerah memobilisasi dan menggunakan sumberdaya lokal untuk meningkatkan layanan publik (Peterson, 1996).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu menurut UU No.32 Tahun 2004 Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) hasil pajak daerah;
- 2) hasil retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) lain-lain PAD yang sah;

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002). PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi - potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006).

Menurut Dewi dalam Maemunah (2006) yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah: meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas (Marsyahrul, 2005: 163):

- a) Pajak daerah;
- b) Retribusi daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.4 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2004: 12). Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Jenis pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2.1.5 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (PP No.69 Tahun 2010). Berdasarkan UU. 28 Tahun 2009, objek retribusi yang dipungut daerah terdiri atas;

a) Objek Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan penguburan mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan lain-lain;

b) Objek Retribusi Jasa Usaha

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyebrangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain; dan

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.6 Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain. Menurut Halim (2008:69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, "1) hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3)

penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah”.

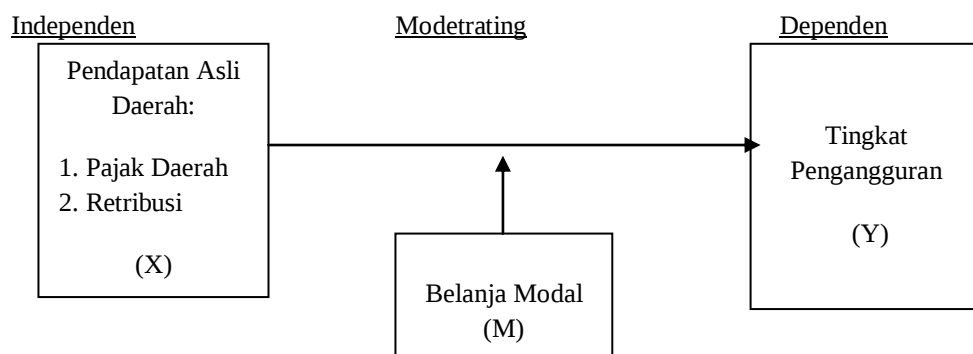
Belanja Modal terdiri dari:

- a. Belanja aset tetap
- b. Belanja Aset tetap lainnya
- c. Belanja aset lainnya
- d. Belanja Lain-lain/Tak terduga
- e. Transfer

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada penelitian ini akan dilakukan uji pengaruh penerapan pendapatan pajak daerah dan retribusi terhadap tingkat pengangguran dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi. Setelah penerapan UU No.28 Tahun 2009 terdapat perbedaan keuangan Pemerintah daerah dikarenakan adanya pengalihan pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mengakibatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memberikan pengaruh terhadap jumlah pengangguran.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.3.3 Pengaruh pajak daerah, Retribusi daerah dan belanja modal terhadap tingkat pengangguran.

Menurut penelitian Kresnandra (2012) dalam penelitiannya yang meneliti tentang pengaruh tingkat pajak daerah dan retribusi daerah terhadap jumlah pengangguran dan belanja modal sebagai pemoderasi menemukan hasil bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, namun secara parsial hanya pajak daerah yang berpengaruh negative sementara retribusi dan belanja modal tidak berpengaruh.

Sejalan dengan hasil penelitian Kresnandra, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudawali (2013) tentang analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan menemukan hasil bahwa realisasi belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

Setiyawati (2007) menyatakan bahwa pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan erat dengan belanja modal atau yang sering disebut belanja pembangunan. Dengan demikian strategi pengalokasian anggaran yang tepat adalah dengan mengoptimalkan potensi sektor-sektor pembangunan melalui pengalokasian hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan dapat menurunkan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Maka dari uraian tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

2.3.4 Pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat pengangguran dengan belanja modal sebagai pemoderasi.

Retribusi merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang berpengaruh cukup besar terhadap total pendapatan asli daerah selain pajak daerah sendiri. Retribusi adalah pungutan secara langsung yang balas jasanya juga diterima secara langsung, maka daripada itu retribusi memiliki peranan penting untuk dapat membiaya kegiatan operasional pemerintah terutama untuk pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian Chang & Ho dalam Abdu Rahman (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan melihat hasil analisis elastisitas PAD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Lin dan Liu dalam Priyo (2006) menyatakan bahwa belanja pembangunan merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan yang kuat antara belanja modal dengan tingkat desentralisasi yang mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Maka dari uraian tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran dengan diperkuat pengaruhnya oleh tinggi belanja modal.

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan data rasio yang pengumpulan datanya dengan data sekunder. Obyek dari penelitian ini adalah pajak dan retribusi daerah, anggaran belanja modal serta tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2014. Data diperoleh Badan Pemeriksa keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

3.2 Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2007:134) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian ini jenis instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, dalam hal ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti majalah, buku, peraturan-peraturan, dan laporan keuangan daerah. Instrumen dokumentasi digunakan karena data-data yang akan diteliti sudah tersedia dan didokumentasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta dipublikasikan secara umum kemasyarakat yang membutuhkan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur instrumen adalah Pendapatan Asli Daerah.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka yang merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi yang masih relevan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang berbentuk tahunan diolah dalam bentuk semester untuk menyeragamkan periode masing-masing variabel.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Interaksi

Terdapat tiga cara untuk menguji regresi dengan variabel moderating, yaitu: (1) Uji interaksi atau Moderated Regression Analysis, (2) Uji nilai selisih mutlak dan (3) Uji residual (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini uji yang akan dilakukan adalah uji interaksi atau Uji Moderated Regression Analysis (MRA). MRA berbeda dengan analisis sub kelompok, karena menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Untuk menggunakan MRA dengan satu variabel predictor (X), maka harus membandingkan kedua persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderator. Kedua persamaan tersebut adalah:

Persamaan *Moderated Regression Analysis* sebagai berikut (Ghozali, 2005):

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3M_i + \varepsilon$$

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1 * M_i + b_4X_2 * M_i + \varepsilon$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X_1 dan X_2 = Variabel independen

M_i = Variable Moderasi

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan objek yaitu laporan hasil pemeriksaan BPK RI tingkat Provinsi pada tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan beberapa sampel Provinsi yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu tipe pemilihan sampel yang informasinya diperoleh

dengan menggunakan pertimbangan (kriteria) tertentu dan umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada sub bab sebelumnya, maka diperoleh sebanyak 33 sampel (berdasarkan 3 tahun penelitian). Data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari situs resmi BPK RI dan BPS RI dari periode 2013-2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang menggunakan *moderated regression analysis*.

4.1.2. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis. Ada 2 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi (X), serta Tingkat Pengangguran sebagai variabel dependen (Y). Hasil dari pengujian statistik deskriptif secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pjk	33	133	23,370	2,636.09	4,554.569
Rtbs	33	1	334	38.48	60.194
Blmdl	33	232	10,411	1,110.67	1,756.392
Pggr	33	2	9	5.55	1.964
Valid N (listwise)	33				

Sumber: Hasil Output SPSS 17, 2016

4.2 Uji Regresi Berganda

4.2.1 Uji Interaksi

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).

Tabel 2
Koefisien Determinasi Moderasi 1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.437 ^a	.191	.107	.40200	2.435

a. Predictors: (Constant), Moderate1, PJK, BLMD

b. Dependent Variable: PGGR

Dari table 4.8 diatas menunjukkan hasil bahwa besarnya adjusted R^2 sebesar 0.107, hal ini berarti 10.7% variasi PGGR yang dapat dijelaskan oleh variasi Independen PJK, BLMD dan Moderate1. Sedangkan sisanya (100% - 10.7%) 89.3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Tabel 3
Koefisien Determinasi Moderasi 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.464 ^a	.216	.134	.39579	2.439

a. Predictors: (Constant), PJK, RTBS, Moderate2

b. Dependent Variable: PGGR

Dari tabel 4.9 diatas menunjukkan hasil bahwa besarnya adjusted R^2 sebesar 0.134, hal ini berarti 13.4% variasi PGGR yang dapat dijelaskan oleh variasi Independen RTBS, BLMD dan Moderate2. Sedangkan sisanya (100% - 10.7%) 86.6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

4.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F statistik bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Maka taraf signifikan yang digunakan sebesar 0,05. Jika probabilitas $F < 0,05$ maka model regresi dapat memprediksi atau memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi. Dengan kata lain, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika probabilitas $F > 0,05$ maka model regresi tidak dapat memprediksi atau berpengaruh terhadap variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi. Dengan kata lain, variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4
Hasil Uji F-Test Moderat1
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.104	3	.368	2.278	.101 ^a
	Residual	4.687	29	.162		
	Total	5.791	32			

a. Predictors: (Constant), Moderate1, PJK, BLMD

b. Dependent Variable: PGGR

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui Uji Anova atau F-Test menghasilkan nilai F hitung sebesar 2.278 dengan tingkat signifikansi $\text{sig.} = 0,101$, karena probabilitas signifikansi jauh lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi Tingkat Pengangguran atau dikatakan bahwa PJK, BLMD dan Moderate1 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap PGGR.

Tabel 5
Hasil Uji F-Test Moderate2
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.248	3	.416	2.656	.067 ^a
	Residual	4.543	29	.157		
	Total	5.791	32			

a. Predictors: (Constant), Moderate2, RTBS, BLMD

b. Dependent Variable: PGGR

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui Uji Anova atau F-Test menghasilkan nilai F hitung sebesar 2.656 dengan tingkat signifikansi $\text{sig.} = 0,067$, karena probabilitas signifikansi jauh lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi Tingkat Pengangguran atau dikatakan bahwa RTBS, BLMD dan Moderate2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap PGGR.

4.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Uji t dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat memprediksi atau memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi. Hasil uji t penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut dengan pengambilan keputusan jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima, artinya variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6
Uji Parsial (*t-test*) Moderate1
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.701	.297		5.734	.000		
PJK	.005	.005	.354	1.040	.307	.240	4.158
BLMD	.020	.011	.733	1.744	.092	.158	6.328
Moderate1	.000	.000	-.678	-1.235	.227	.093	10.803

a. Dependent Variable: PGGR

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam regresi, semua menunjukkan hasil bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran. Variabel PJK memberikan nilai koefisien parameter 0.005 dengan signifikansi 0.354 dan variabel BLMD memberikan nilai koefisien parameter 0.020 dengan signifikansi 0.092. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal (BLMD) sebagai variabel moderasi yang lemah atau dapat dikatakan bukanlah variabel moderating terhadap variabel dependen dan independen.

Tabel 7
Uji Parsial (*t-test*) Moderate2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.581	.307		5.148	.000		
RTBS	.023	.011	.868	2.235	.033	.179	5.573
Moderate2	-.001	.001	-.850	-1.603	.120	.096	10.391
BLMD	.050	.040	.402	1.243	.224	.259	3.865

a. Dependent Variable: PGGR

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam regresi, variabel RTBS berpengaruh secara signifikan terhadap PGGR. Variabel RTBS memberikan nilai koefisien parameter 0.023 dengan signifikansi 0.033 sedangkan variabel BLMD tidak memberikan pengaruh yang signifikan dengan memberikan nilai koefisien parameter 0.050 dengan signifikansi 0.224, sebagai variabel moderasi yang lemah atau dapat dikatakan bukanlah variabel moderating terhadap variabel dependen dan independen.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dengan melakukan uji interaksi atau uji MRA antara realisasi pendapatan pajak daerah (X1), realisasi pendapatan retribusi (X2) terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengangguran (Y) dengan dimoderasi oleh belanja modal (M). Hasil uji F menegaskan bahwa ketiga variabel yang diujikan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengangguran. Dilihat dari hasil uji F dapat diketahui bahwa semua variabel dependen tidak memiliki pengaruh yang ditunjukkan dengan masing-masing variabel bernilai signifikansi $> 0,05$ dan variabel belanja modal sebagai variabel moderasi yang lemah atau dapat dikatakan bukanlah variabel moderating terhadap variabel dependen dan independen, ditunjukkan dengan pengaruh belanja modal tidak signifikan terhadap variabel independent dengan nilai signifikansi $> 0,05$.

4.3.1 Pengaruh Realisasi Pajak Daerah terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Pemoderasi

Realisasi pendapatan pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup tinggi pengaruhnya dibanyak provinsi di Indonesia, seperti halnya kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain-lain) memiliki sumber pendapatan asli daerah yang paling terbesar adalah pendapatan pajak daerah. Namun hal ini tidak berlaku untuk daerah-daerah kecil lainnya. Pendapatan asli daerah didaerah kecil masih tidak berpengaruh besar dikarenakan nilai pendapatan pajak daerah yang mereka

peroleh bernilai kecil, maka daerah-daerah kecil masih sangat berbantuan kepada dana perimbangan yang dibagikan oleh pemerintah kepada daerah-daerah, khususnya daerah yang masih jarang penduduknya.

4.3.2 Pengaruh Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Pemoderasi

Berlakunya UU tentang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapuskan karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah yaitu salah satunya adalah retribusi atas perusahaan minyak dan gas, sedangkan sebagian besar wilayah Provinsi di Indonesia daerahnya memiliki potensi sumber minyak yang besar, sehingga banyak perusahaan minyak yang membuka usahanya di daerah mereka.

Pemendagri No.26 Tahun 2016 yang berbunyi Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemungutan retribusi pada perusahaan minyak dan gas. Hal ini mengurangi secara drastis pendapatan retribusi daerah salah satunya seperti yang dialami Pemkab Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Daerah tersebut yang awalnya mendapatkan retribusi daerah dari PetroChina terhadap HO, namun sekarang semenjak diberlakukannya permendagri tersebut Pemkab Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan pendapatan retribusi sebesar Rp.1,2 M. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil, namun jumlah yang cukup besar penganggurannya terhadap pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan atas penelitian yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran. Secara pengujian parsial (Uji t) hanya variabel retribusi daerah saja yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran sementara pajak daerah dan belanja modal tidak berpengaruh. Untuk pengujian pengaruh variabel moderasi menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan moderasi belanja modal terhadap pajak daerah dan retribusi daerah pada tingkat pengangguran.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menguji tingkat pengangguran dilihat per-Provinsi yang besar kemungkinan dalam satu Provinsi tersebut tingkat pengangguran tiap Kabupaten atau Kota mempunyai nilai yang berbeda-beda.
2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya 3 tahun sehingga belum bisa menggambarkan secara utuh pengaruh belanja modal sebagai pemoderasi terhadap tingkat pengangguran, karena belanja modal merupakan investasi pemerintah yang efeknya berada dijangka panjang.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data tiap Kabupaten atau Kotamadya sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara detail keadaan masing-masing daerah.
2. Penelitian selanjutnya menambah periode waktu yang lebih lama untuk bisa melihat pengaruh secara utuh belanja modal di jangka panjang.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel moderasi lainnya untuk dapat melihat dorongan dari variabel moderasi tersebut, seperti contohnya belanja pegawai, belanja pembangunan atau instrument belanja lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, Rudi. 2011. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Disumatera Selatan." *Jurnal Ilmiah*, Vol III No.2 Portal.kopertis2.or.id/jspui/bitstream/.../1/Rudi32.pdf
- Fahmi, M. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: CV.Alfabeta
- Fred R. David, 2011. *Strategik Management Concep*. Pearson: England
- Ghozali, dkk (2012) "Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan APBD." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No.1 pp. 201-210. Diakses tanggal 14 maret 2014, dari e-jurnal.undip.ac.id
- , (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, Abdul, 2006. *Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. 127-146.
- Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Henderson, Dale A, Burce W. Chase and Benjamin Woodson. 2007. *Performance Measure for Non Profit Organisation*. Radfor University. Diakses 2 Mei 2014, dari Journal Of Accountancy.
- Kawedar, Wrsito. Abdulrahman, Handayani, Sri. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah & Akuntansi Keuangan Daerah*. Jilid 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kresnandra, Ngurah. 2007. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Kurniati, Siti. 2012. "Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Jawa tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi." *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Ladjin, Nurjanna. 2008. "Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah)." Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Nordiawan, D. I.S. Putra, dan Rahmawarti M. ,2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Depdagri RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Depdagri RI.
- Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods For Business*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Setiyawati, Anis. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekkonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalir*. Universitas Trunojoyo.
- Sigit, Okta. 2013. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfa Beta
- Usman and Setiadi, 2006. *Pengantar Statistika*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- www.pajak.go.id 2012. *Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai pajak daerah*